**KEBIJAKAN LARANGAN PENGRUSAKAN UANG KERTAS (PERILAKU
VANDALISME) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG**

Meida Nur Fadila Syuhada, Shazanda Putri Jenica

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Jl. Mayor Sujadi Timur 46, Tulungagung

Email : meidanurfadila04@gmail.com, shazandaputrij@gmail.com

Naskah dikirim: 28/10/2024, direvisi: 17/07/2024, diterima:10/11/2024

Abstract

The behavior of a person who intentionally damages, destroys, cuts or aggravates damage to banknotes with the intention of causing harm to other people is a form of criminal action in the destruction or vandalism of banknotes which is considered an immoral act and can be held criminally accountable in accordance with applicable law. In this study, the author uses a normative juridical study method. This study uses data, namely primary, secondary and tertiary data as well as library research and relevant document study. The technique used is a qualitative analysis technique which involves collecting, processing, analyzing and constructing complete and systematic data that regulates interactions between various types of data. By taking the problem formulation, namely what form of damage to paper money takes in Law no. 7 of 2011, what are the basic regulations regarding the destruction of banknotes and what is the form of criminal liability for perpetrators of destroying banknotes. Based on the findings of this research, it can be understood that tampering with banknotes as described in Law Number 7 of 2011 concerning Currency, changes the shape or physical size of the original money, such as burning, perforating, removing part of it, or ripping, cutting, destroying, or changing the value of money with the intention of degrading the honor of money, including criminal acts, is an unlawful act.

Keywords: *Prohibition, destruction, banknotes, accountability*

Abstrak

Perilaku seorang yang dengan sengaja merusak, menghancurkan, memotong atau memperparah kerusakan pada uang kertas dengan niat menyebabkan kerugian pada orang lain merupakan bentuk tindakan pidana dalam pengrusakan atau *vandalisme* terhadap uang kertas yang dianggap sebagai tindakan tidak bermoral dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam studi ini, penulis menggunakan metode studi yuridis normatif. Studi ini menggunakan data yaitu data primer, sekunder, dan tersier serta penelitian kepustakaan dan study dokumen yang relevan. Teknik yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif yang

melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data lengkap dan sistemistik mengatur interaksi antara berbagai jenis data. Dengan mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk pengrusakan uang kertas pada UU No. 7 Tahun 2011, bagaimana dasar pengaturan tentang pengrusakan uang kertas dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengrusakan uang kertas. Didasarkan pada temuan penelitian ini, dapat dipahami bahwa pengrusakan uang kertas yang dijelaskan dalam Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengubah bentuk, atau ukuran fisik dari uang aslinya, seperti membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek, memotong, menghancurkan, atau mengubah nilai uang dengan maksud merendahkan kehormatan uang, termasuk tindakan pidana, ialah tindakan melawan hukum.

Kata Kunci: Larangan, pengrusakan, uang kertas, pertanggungjawaban

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berdaulat yang berdasarkan hukum, kedaulatan sendiri berarti wewenang atau kekuasaan tertinggi suatu negara berdasarkan kemerdekaan bangsa untuk melaksanakan tujuan negara dan memberikan kebebasan penuh kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahannya. Uang merupakan bentuk dari kedaulatan yang harus dihargai oleh semua penduduk negaranya. Indonesia telah mengeluarkan uang rupiah secara resmi yang berlaku Negara Indonesia. Rupiah tidak hanya sebagai metode pembayaran yang sah dalam tiap-tiap transaksi yang terjadi di wilayah yang berada di bawah kendali negara Indonesia tetapi sebagai lambang kemandirian dan kebanggaan nasional. Setelah perjuangan panjang, Oeang Rupiah Indonesia atau ORI ditetapkan sebagai metode pembayaran legal pada 30 Oktober 1946 lalu diperingati sebagai Hari Uang Nasional.¹

Selama beberapa dekade pemerintah terus berusaha memperbaiki kualitas sistem keuangan. Pada masa orde baru, pemerintah memberikan wewenang kepada Bank Indonesia yang didirikan pada tahun 1953 untuk mencetak, mengeluarkan dan merencanakan secara penuh perputaran uang baik dalam bentuk kertas maupun koin. Hak tunggal Bank Indonesia untuk

¹ Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, "Sekilas Sejarah Hari Oeang Republik Indonesia" (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-madiun/baca-artikel/16545/Sekilas-Sejarah-Hari-Oeang-Republik-Indonesia.html>, diakses Minggu, 13 Oktober 2024)

mengeluarkan uang kertas dan logam sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1963 yang di dasari adanya dualiti fungsi antara *De Javasche Bank* dan Bank Indonesia, dalam pertimbangan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah secara ekonomi dipandang sebagai tidak adanya perbedaan fungsional.² Oleh karena itu, satu-satunya organisasi yang harus menangani pengeluaran uang untuk keseragaman dan efektivitas adalah Bank Indonesia. Pengaturan yang membahas mengenai ragam bentuk dan harga mata uang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 23B yang berbunyi "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang". Adanya aturan diatas bertujuan untuk menjamin perlindungan ataupun kepastian bahwa bagi setiap macam ataupun nilai yang terkandung dalam setiap mata uang rupiah.

Atas dasar amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23B maka lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 yang mengatur secara implisit tentang Mata Uang, alasan lain dibentuknya Undang-Undang tersebut untuk pertimbangan bahwasannya Rupiah, salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia wajib di jaga. Dalam kehidupan bernegara tentu sangat berkaitan dengan penggunaan dan peranan uang dalam kehidupan sehari-hari. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 merupakan angin segar, bahwa bangsa juga turut andil melindungi simbol kedaulatan berupa mata uang rupiah.

Namun, seiring dengan kemajuan zaman munculnya fenomena-fenomena baru di tengah masyarakat, perilaku *vandalisme* pada uang kertas menjadi trend di kalangan warga terutama pengrusakan pada uang kertas. Seperti hal yang sudah biasa, terkadang dianggap sebagai bentuk menuangkan jiwa seni dengan menggambar dengan media uang kertas, menurut Shinta Ayu selaku dosen FH UMM Selain itu, tindakan ini akan menciderai integritas sistem keuangan, berdampak sosial dan ekonomi. Selain itu dampak sosialnya meningkatkan tingkat kriminalitas dan kejahatan, merusak moral masyarakat, memperlambat penurunan kemiskinan, dan membatasi akses

² Ibid.

masyarakat miskin terhadap pendidikan dan layanan publik. Prakteknya yang sering ditemui di masyarakat pada uang kertas Dengan jumlah kecil, yang berkisar antara 1.000 dan 20.000 rupiah, jumlah yang lebih besar masih jarang ditemukan.³

Melihat fakta adanya tindakan mengenai mata uang tersebut ketentuan tindak pidana mengenai pengrusakan mata uang rupiah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP belum diatur secara tegas yang membahas mengenai macam-macam tindakan dan larangannya. Demi memberikan jaminan terhadap mata uang pemerintah telah mengatur secara rinci mengenai tindakan kejahatan yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 1 Miliar rupiah."⁴

Untuk menghentikan kejahatan terhadap mata uang ialah dengan memberikan kepastian hukum untuk tiap-tiap kejahatan finansial tersebut, pelaku diharapkan dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal diatas, siapa pun yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, atau mengubah nilai uang dengan tujuan menurunkan nilainya martabatnya, maka tindakan tersebut merupakan melawan hukum. Namun, realita yang terjadi adalah banyak tindakan kejahatan pengrusakan uang kertas seperti menggambar dengan media uang, belum ada yang dijatuhi hukuman baik penjara maupun denda sesuai dengan Ayat Pertama Pasal 35 UU Nomor 7 Tahun 2011. Jadi, berdasarkan hal diatas penulis akan menganalisis dengan judul **“Kebijakan Larangan pengrusakan uang kertas (perilaku vandalisme) dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”**.

³ Shinta Ayu P, “Dosen UMM Shinta Ayu Purnawati Ingatkan Agar Tidak Merusak Uang Dengan Sengaja, Ada Pidana 5 Tahun”(<https://www.umm.ac.id/en/arsip-koran/suryamalangcom/dosen-umm-shinta-ayu-purnamawati-ingatkan-agar-tidak-merusak-uang-dengan-sengaja-ada-pidana-5-tahun.html>, diakses Minggu, 13 Oktober 2024)

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Tahun 2023 menandai peristiwa Bank Indonesia (BI) memusnakan uang tak layak edar sebanyak Rp 342 Miliar dalam periode empat bulan terakhir atau antara Januari dan April 2023. uang yang tidak layak edar tersebut di dominasi berupa uang rusak dan lusuh. Penulis juga sering menjumpai adanya menormalisasi budaya pengrusakan uang dalam masyarakat. Hal ini, kurangnya edukasi bahwa perilaku pengrusakan uang secara disengaja merupakan perbuatan yang melanggar atau melawan hukum. Dari penjabaran diatas melatarbelakangi penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai **“Kebijakan larangan pengrusakan uang kertas (perilaku *vandalisme*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”**.⁵

Dari penjelasan diatas, penulis dapat membuat rumusan masalah, yaitu apa dasar hukum pengaturan pengrusakan pada uang kertas, bagaimana bentuk-bentuk pengrusakan uang kertas, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi perilaku pengrusakan (*vandalisme*) pada uang kertas. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi mengenai objek penelitian serta membatasi penelitian sehingga penelitian dapat memilih data yang relevan dan tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam studi kualitatif lebih berfokus pada tingkat urgensi data, seberapa penting penelitian ini dilakukan. Penelitian ini memuat rincian “Kebijakan larangan pengrusakan uang kertas (perilaku *vandalisme*) dalam Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011”, yang dimana objek utama dalam penelitian ini yaitu perilaku *vandalisme*.

Dalam metode ini penelitian menggunakan penelitian berupa yuridis normatif. Penelitian yang difokuskan pada analisis dan menelaah teori, asas serta konsep hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam studi ini penulis mengumpulkan data berupa data primer, sekunder, dan tersier, yang semuanya kemudian dianalisis untuk menemukan solusi dari permasalahan yang penulis kaji dengan metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan

⁵ Resa Isnir, “BI Musnahkan Uang Tak Layak Edar”, (<https://www.hukumonline.com/berita/foto/f/bi-musnahkan-uang-tak-layak-edar-lt59784b476f2df>, diakses Jumat, 11 Oktober 2024)

data dan informasi hukum yang bersumber pada bahan tertulis yang biasa ditemukan dalam metode penelitian kepustakaan. Sumber data tersebut adalah :

1. Sumber hukum primer

Penelitian ini mengumpulkan data bahan baku hukum primer dimana dengan menggunakan pendekatan hukum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

2. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal hukum, artikel hukum, laporan penelitian, dokumen hukum, maupun buku dan literatur serta bahan-bahan hukum lainnya yang relevan untuk menunjang penulisan ini.

3. Sumber hukum tersier

Kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah adalah contoh bahan hukum sekunder sedangkan bahan hukum yang menjelaskan serta membantu bahan hukum primer adalah bentuk dari bahan hukum tersier. dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang dikaji penulis.

Mengingat metode analisis yang penulis gunakan yaitu kualitatif, mencakup pengumpulan keseluruhan data, kemudian dikerjakan dalam bentuk pengumpulan keseluruhan data yang kemudian data tersebut diolah dengan cara menganalisis secara sistematis. Kemudian, data yang diolah dianalisis secara dekriptif hingga kemudian dapat mengungkapkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang penulis kaji. Sifat dari kepenulisan ini merupakan sifat yuridis normatif, dimana sifat ini memfokuskan terhadap data sekunder, sehingga dalam data utama penelitian pengumpulannya berasal dari data dokumen serta kepustakaan yang relevan.

B. Pembahasan

B.1 Dasar Hukum Pengrusakan Uang Kertas

Indonesia merupakan negara berdaulat yang berdasarkan hukum, kedaulatan sendiri berarti wewenang atau kekuasaan tertinggi suatu negara berdasarkan kemerdekaan bangsa untuk melaksanakan tujuan negara dan memberikan kebebasan penuh kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahannya. Uang merupakan salah satu bentuk kedaulatan yang harus dihargai serta dihormati oleh warga negaranya. Indonesia sendiri sudah mengeluarkan mata uang resmi yaitu rupiah yang sudah berlaku di seluruh Indonesia. Rupiah tidak hanya digunakan sebagai metode pembayaran yang sah untuk setiap transaksi yang dilakukan di wilayah pemerintahan Indonesia tetapi sebagai lambang kemandirian dan kebanggaan nasional.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanati mengenai ragam bentuk dan harga mata uang yang berbunyi "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang," diatur dalam Pasal 23B dari UUD Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan dari adanya pengaturan diatas semestinya untuk menjamin perlindungan serta memberikan kepastian hukum bagi tiap-tiap nilai yang ada dalam uang rupiah. Dalam kilas sejarah mengenai mata uang telah dibentuk sebanyak 4 (empat) kali Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang⁶ adapun perubahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Adanya perubahan bentuk peraturan tersebut bukan sebagai dasar pelaksanaan amanah yang ada pada bunyi UUD 1945 Pasal 23B, melainkan sebagai konsekuensi dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 109 (4) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang menyatakan bahwa "Pengeluaran alat pembayaran yang sah dilakukan oleh atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Sirkulasi". Bank Sirkulasi yang

⁶ "Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2011"

(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>, diakses Senin, 13 Oktober 2024)

disebutkan dalam UUDS 1945 adalah Bank Sentral yang berwenang mengatur peredaran uang suatu negara. Bank Sirkulasi memiliki tanggungjawab atas kebijakan moneter dan peredaran uang kertas dan logam.⁷

Uang dalam sistem perekonomian era ini memainkan peran yang sangat penting. Selain menjadi alat transaksi, juga sebagai alat dalam menyimpan nilai hingga sebagai alat satuan hitung. Pada dasarnya uang merupakan sarana fasilitas perekonomian dengan cara mengurangi nilai tukar dibanding dengan sistim pertukaran atau barter. Selain fungsi untuk menyimpan nilai, uang pada dasarnya juga sebagai alat tabungan untuk memperkirakan pengeluaran konsumsi di masa yang akan datang. Kegunaan lainnya adalah sebagai sarana efisien dipasar, mendongkrak investasi, serta menstabilkan perekonomian. Peraturan Bank juga berdampak pada sektor moneter yang dijalankan negara, contohnya sebagai sumber alat kendali pengeluaran uang serta menetapkan suku pada bunga, serta peran lainnya ialah mengelola inflasi sebuah negara, turut serta dalam pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan adanya penjabaran ini, uang merupakan elemen terpenting dalam menjalankan sebuah negara.⁸

Berdasarkan peranan uang yang sangat krusial, mata uang sudah semestinya dibedakan hingga sulit untuk meniru atau dipalsukan oleh pihak-pihak lain. Oleh sebab itu, kasus ini peranan otoritas yang berwenang dibutuhkan untuk mengetahui karakteristik, desain serta bahan baku mata uang rupiah. Sebab di era modern munculnya beberapa kejahatan mata uang, terutama kejahatan pemalsuan mata uang, semakin merajalelanya kejahatan terhadap mata uang dalam skala yang lebih besar dan sangat meresahkan, terutama dalam dampak yang disebabkan oleh perilaku pemalsuan uang yang mengancam keadaan moneter hingga mengancam ekonomi negara. Modus Kejahatan terhadap mata uang yang semakin meningkat, sementara ketentuan tindak pidana tidak dijelaskan secara

⁷ Ibid

⁸ Ainun Mardiah DKK, *“Peranan Uang Dalam Perekonomian”* (Univ. Islam Negeri Suthan Thaha Saifudin Jambi, Indonesia)

eksplisit di KUHP mengenai macam tindakan hingga ancaman sanksi hukuman. Atas pertimbangan tersebut, perlu adanya pengaturan mengenai macam dan nilai mata uang, dalam hal ini termasuk juga mengatur tentang kategori kejahatan mata uang karena Pengaturan dalam Undang-Undang merupakan kebutuhan yang sangat penting. Karena kejahatan mata uang dipengaruhi secara signifikan terhadap perekonomian negara dan martabat bangsa secara keseluruhan, penegakan hukum kejahatan ini membutuhkan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, setiap orang atau pelaku yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam UU ini akan mendapatkan sanksi pidana yang sangat tegas dan berat.

Seiring perkembangan jaman yang semakin modern munculnya fenomena-fenomena baru di tengah masyarakat, perilaku *vandalisme* pada uang kertas menjadi trend di kalangan warga terutama pengrusakan pada uang kertas. Seperti hal yang sudah biasa, terkadang dianggap sebagai bentuk menuangkan jiwa seni dengan menggambar dengan media uang kertas, pengrusakan mata uang telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 menetapkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah uang Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan uang Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku pengrusakan mata uang kertas diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum pidana yang menyebutkan :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang memberikan atau menjajikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberikan

⁹ Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

kesempatan, sarana, atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan;

- (3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.¹⁰

Jika dihubungkan dengan Pasal 56 Ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lazimnya digunakan sebagai penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan) yaitu yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu. Adapun bunyi Pasal 56 Ayat (1) KUHP adalah

Dipidana sebagai pembantu kejahatan

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kriminalitas terjadi;
(2) Mereka yang dengan sengaja memberikan orang peluang untuk melakukan kejahatan.¹¹

Seseorang yang berpartisipasi dalam membantu melakukan tindak pidana, baik sebelum atau setelah kejahatan tersebut dilakukan, dapat didefinisikan dengan penerapan Pasal 55 KUHP. Dalam aturan pasal ini, Pelaku kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dikenakan sanksi pidana. Menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pelaku tindak pidana kejahatan didefinisikan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medeplegen*). Menurut ketentuan yang tercantum dalam KUHP tersebut, seseorang dapat digolongkan sebagai pembuat tindak pidana jika antara mereka mempunyai ide atau orang yang turut membantu melakukan tindak pidana tersebut.

B.2 Bentuk pengrusakan uang kertas pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹⁰ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengrusakan menurut hukum pidana merupakan perbuatan yang merugikan barang orang lain tanpa mengambil barang tersebut dikenal sebagai pidana. Salah satu jenis kejahatan yang ada di masyarakat adalah pengrusakan uang kertas. Kejahatan tidak berasal dari peristiwa hereditas, dan bukan juga berasal dari warisan biologis.¹² Menurut Durkheim, kejahatan dianggap sebagai gejala biasa di masyarakat sampai tingkat keberadaannya melampaui batas yang dapat dikontrol oleh hukum yang berlaku. Pada arti umumnya, kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum atau peraturan lokal serta dapat berpotensi merugikan orang lain. Tindakan kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun tidak memandang gender, ras, maupun agama tiap masyarakat, bahkan tindakan Kejahatan dilakukan oleh anak-anak sudah marak dilakukan. aksi kejahatan ini dapat dilaksanakan secara sadar, yang berarti dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Kejahatan merupakan konsep yang memiliki sifat abstrak, yang dapat diartikan bahwa Kejahatan tidak dapat disentuh atau diamati kecuali akibatnya dirasakan akibatnya.

Menurut Budianto, tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya faktor dari tingkat kejahatan di negara Indonesia. Dengan demikian, jika masalah pengangguran tidak segera diselesaikan, kejahatan akan meningkat. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejahatan yang ada di negara ini, faktor yang utama yang sering dijumpai ialah faktor ekonomi masyarakat, kekuarangan fasilitas hingga industrialisasi-urbanisasi serta faktor sosiologis lainnya.

Uang merupakan sesuatu yang tidak lepas dari kegiatan sehari-hari manusia, fungsi utama uang ialah alat tukar menukar dalam transaksi jual beli maupun perdagangan, kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari peranan uang, uang memastikan berjalan dan berlangsung menjadi alat untuk melakukan transaksi diseluruh dunia. Dalam setiap negara, mata uang mempunyai nilai tukar yang berbeda-beda. Keberadaan

¹² Wirjono Prodjodikoro, "Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia", (Repika Aditama, Bandung, 2003) Hal. 1.

mata uang memunculkan daftar mata uang tertinggi hingga terendah di perekonomian global. Akibat dari fungsi uang yang sangat penting, muncul sifat psikologis manusia untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya bahkan yang paling buruk ditempuh dengan cara tidak dihalalkan oleh hukum.

Mata uang negara Indonesia adalah rupiah, yang merupakan simbol kedaulatan negara. Maka, sudah sepantas tiap-tiap masyarakat menggunakan uang sebagaimana mestinya bukan untuk di rusak. Bahkan suatu tindakan kecil terhadap rupiah dapat dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Karena rupiah memiliki makna simbolis dari sejarah, perjuangan, dan cita-cita bangsa Indonesia lebih dari sekedar mata uang. Merusak uang rupiah juga dapat dianggap sebagai pemalsuan karena tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dapat mengancam kestabilan ekonomi negara, bentuk-bentuk kejahatan terhadap mata uang :

1. Membuat coretan-coretan pada uang kertas
2. Merusak atau merobek uang kertas
3. Memotong lembaran uang kertas
4. Melubangi/menghancurkan uang kertas
5. Mengumpulkan uang logam dijadikan sebagai benda atau perhiasan, bahkan jika harus membeli, dan meleburnya untuk menjadi benda atau perhiasan, atau karena harga logam lebih tinggi daripada nilai mata uang, atau karena kadar aluminium atau perak yang sangat tinggi dalam mata uang logam tinggi.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menetapkan hukuman pidana penjara paling maksimal yaitu lima tahun sedangkan pidana denda hingga Rp 1 miliar untuk pelaku atau seseorang yang dengan sengaja merusak, mengubah bentuk, atau ukuran fisik uang, seperti membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobeknya. Selain itu, pengaturan sanksinya dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 menyatakan bahwa tindakan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, atau mengubah nilai uang rupiah akan dipenjara dengan maksimal 5 tahun dan denda maksimal paling banyak yaitu Rp. 1 miliar dengan tujuan

merendahkan kehormatannya termasuk dalam kategori pidana. Pada ayat (3), ditetapkan bahwa setiap orang yang mengimpor atau mengekspor uang rupiah yang rusak dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda tertinggi yaitu Rp. 10 miliar.

Adanya fenomena baru yaitu pengrusakan uang kertas sangat meresahkan terutama bagi Masyarakat sebagai pelaku dan Bank Indonesia sebagai otorisator maupun terdampak langsung sebab menjadi penerima uang kertas. Penyebab kerusakan uang kertas yang beredar juga sangat dominan adalah kurang pedulian mengenai perlakuan dan penyimpanan. Namun, faktor lain juga disebabkan karena menganggap mencoret ataupun menggambar di media uang kertas sebagai sebuah seni yang ada ditengah masyarakat. Tentunya karena faktor-faktor tersebut akan menghasilkan uang yang tak layak edar. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Mengenai Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah Yang Dimusnahkan Tahun 2022 mengatur uang tak layak edar: Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia ini mengatur bahwa:

Pasal 1

1. Uang rupiah merupakan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai mata uang.
2. Uang rupiah yang lusuh, cacat, atau rusak disebut Rupiah Tidak Layak Edar.
3. Pemusnahan adalah suatu tindakan meracik, melebur, atau cara lain untuk memusnahkan uang sehingga tidak terlihat menyerupai Uang Rupiah.¹³

Meskipun uang yang telah di coret-coret masih dapat digunakan untuk keperluan transaksi jual-beli, namun uang tersebut masuk dalam kategori uang yang tak layak edar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

¹³ Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

B.3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perilaku Pengrusakan (*Vandalisme*) Pada Uang kertas

Atas seberapa penting peranan uang dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perekonomian negara, maka bagi tiap pelaku yang melakukan pengrusakan atau *vandalisme* dengan uang kertas harus diberi sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan. Hukum merupakan sebuah pengharapan atas kepercayaan masyarakat dalam mengatur kehidupan bersama. Selain itu, hukum ialah manifestasi prinsip keyakinan. Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorenkenbaardheid* atau disebut dengan *criminal responsibility* bermakna kepada pemidanaan tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa ataupun tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang terjadi atau tidak. Berdasarkan Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru, pertanggungjawaban pidana berlandaskan pada celaan objektif terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan hukum, sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Agar seseorang dianggap bertanggung jawab atau dapat dikenakan pidana, harus ada unsur kesalahan yang berupa kesengajaan atau kelalaian.¹⁴ Sebaliknya, pelaku yang memenuhi syarat hukum dapat dijatuhi pidana berdasarkan tindakan yang dilakukannya. Menurut Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983, pertanggungjawaban pidana mencakup celaan objektif terhadap tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, serta secara subjektif terhadap pelaku yang memenuhi syarat untuk dikenakan pidana atas perbuatannya.¹⁵

Menurut penjelasannya, tindak pidana hanya berlaku ketika ada pertanggungjawaban pidana; itu tidak berdiri sendiri. Ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana diperlukan agar seseorang dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana berasal dari celaan objektif atau *vewijbaarheid* terhadap perbuatan yang dianggap tindak pidana yang berlaku dan secara

¹⁴ Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru Tahun 2023

¹⁵ Pasal 27 Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1982/1983

subjektif terhadap pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dikenai tindak pidana.

Dasar-dasar teori tersebut dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengrusakan (*vandalisme*) terhadap uang kertas, maka tiap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dapat dijerat dengan sanksi berupa pidana, Sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang:

1. Seseorang yang secara sengaja merusak, memotong, menghancurkan, atau mengubah mata uang Rupiah dengan tujuan merendahkan kehormatan mata uang tersebut sebagai simbol negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Orang yang membeli atau menjual uang Rupiah yang telah dirusak, dipotong, dihancurkan, atau diubah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2), akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebesar 1 miliar rupiah.
3. Jika seseorang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang telah dirusak, dipotong, dihancurkan, atau diubah, sesuai dengan Pasal 25 ayat (3), mereka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal sebesar 100.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Di era sekarang, kebutuhan terkait penegakan hukum bagi pelaku *vandalisme* terhadap mata uang menjadi sangat urgent, hal ini disebabkan fenomena tersebut semakin merambah dan marak dilakukan terbukti Bank Indonesia pada tahun 2022 telah memusnahkan uang dengan total Rp 189,1 Triliun mencakup UTLE seperti uang cacat, lusuh hingga uang yang penuh dengan stempel bahkan coretan. Serta di satu tahun setelahnya yaitu tahun 2023 Bank Indonesia (BI) juga memusnakan uang tak layak edar sebanyak Rp 342 Miliar dalam periode empat bulan terakhir atau antara Januari dan April 2023. Uang yang tidak layak edar tersebut di dominasi berupa uang

rusak dan lusuh. Adanya fakta-fakta inilah yang kemudian penegakan hukum terkait perilaku pengrusakan uang kertas dianggap sangat urgent.

Namun, semakin menjadi tren di masyarakat adanya fakta-fakta tersebut tidaklah menjadi alat kesadaran bagi masyarakat untuk tidak merusak uang rupiah bahkan tindak pidana tersebut dilakukan secara terang-terangan di sosial media. Yang ramai dibicarakan terkait unggahan vidio pendek di aplikasi tiktok yang memperlihatkan potret pahlawan nasional Frans Kaisiepo pada pecahan uang kertas Rp 10.000 yang digambar seperti hantu. Lalu pada vidio yang memperlihatkan uang kertas senilai Rp 10.000 digambar dan dicoret-coret yang diunggah oleh akun media sosial twiter pada tanggal 9 Juni 2024, dividio lainnya juga terlihat gambar wajah mantan Gubernur Papua yang digambar seperti mengenakan ikat rambut layaknya perempuan. Lalu pada vidio lain yang berisi salah satu pedagang makanan di Jakarta mengembalikan uang dengan cara menstaples nota diatas uang. Padahal, menstaples uang termasuk dalam kategori merusak uang yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Mata Uang yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/ mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara

Adanya fenomena tersebut aparat penegak hukum sudah selaknyaknya harus memberikan jaminan kepastian hukum terkait tindak pidana pelaku pengrusakan uang kertas yang diatur secara rinci pada UU No. 7 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Mata uang. Meskipun, adanya jaminan hukum yang terkait perilaku pengrusakan uang kertas, tetapi dalam implementasinya belum di dapati dengan maksimal. Ditinjau lebih jauh, tindak pidana pengrusakan pada uang kertas sulit untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, sebab sulit menemukan tiap-tiap pelaku pengrusakan. Tetapi, dalam fenomena diatas, seharusnya pelaku sudah dapat dijerat dengan pidana, dikarenakan dalam vidio yang berdurasi pendek tersebut telah memperlihatkan aksi pelaku yang dapat dijadikan sebuah bukti untuk dilakukannya penegakan hukum.

Dalam memberikan jaminan kepastian hukum, pihak berwenang perlu menegakkan hukum. *Law enforcement* atau yang disebut penegakan hukum adalah kegiatan yang menerapkan hukum dan melakukan sebuah tindakan bagi pelanggar atau penyimpangan terhadap hukum. Proses penegakan hukum melibatkan beberapa elemen-elemen yang memiliki kewenangan seperti pengadilan dan aparat keamanan yang diberi tanggung jawab untuk memeriksa dan memproses tindakan melanggar hukum serta menghukum mereka yang terbukti melakukannya serta memelihara keamanan, ketertiban dan stabilitas, serta dengan memastikan bahwa setiap orang merasa aman dan memiliki hak yang sama di dalam lingkungan bermasyarakat, adalah tujuan dari penegakan hukum. Namun, terdapat faktor-faktor penghambat yang ada dalam penegakan hukum seperti, faktor yang berasal dari hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat itu sendiri dan budaya yang ada. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks pengrusakan uang kertas, meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak mengatur mengenai sanksi pidana pengrusakan uang kertas, pada UU No. 7 Tahun 2011 pasal 35 menyebutkan secara rinci sanksi bagi tiap-tiap pelaku pengrusakan uang kertas. “Seseorang yang secara sengaja merusak, memotong, menghancurkan, atau mengubah mata uang Rupiah dengan tujuan merendahkan kehormatan mata uang tersebut sebagai simbol negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1), akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Hal ini menunjukkan bahwa pengrusakan uang kertas merupakan bentuk tindak pidana kategori serius serta dapat dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut dapat berupa denda, penjara, atau keduanya, tergantung pada tingkat tindakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan adanya sanksi yang tegas tersebut, negara berupaya dalam mencegah serta menghentikan tindak pidana pengrusakan mata uang kertas dan

memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta perlindungan bagi sistem keuangan negara.

Pelaku pengrusakan uang kertas di Indonesia mengalami hambatan yang sangat signifikan dalam proses pidana, hal ini dikarenakan beberapa hambatan dalam penegakan hukum sehingga mengurangi keefektifan dalam penegakan tersebut. Di Indonesia pengaturan mengenai perilaku pengrusakan uang kertas telah diatur secara rinci pada UU No. 7 Tahun 2011 yang berisi bahwa tindakan pengrusakan pada uang kertas merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, dalam KUHP tidak ditemukan mengenai aturan khusus yang berisikan tindak pidana pengrusakan uang kertas berupa sanksi pidana atas tindakan itu. Dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejatinya tidak memalsukan pengrusakan uang kertas sebagai tindakan pidana yang secara langsung diatur, sehingga sulit bagi aparaturnya penegak hukum untuk menemukan dasar hukum sebagai pijakan. Akibatnya, proses hukum bagi pelaku pengrusakan uang kertas bergantung hanya pada undang-undang sektor keuangan atau aturan administratif yang memiliki kelemahan dari sisi penegakan pidana.

Selain itu, dalam praktik hukum, pembuktian niat jahat pelaku perusakan uang kertas kerap menjadi kendala besar. Dalam banyak kasus, tindakan merusak uang kertas terjadi karena kelalaian atau tanpa kesadaran penuh dari pelaku bahwa perbuatannya melanggar hukum. Misalnya, seseorang bisa saja secara tidak sengaja menggunting atau merusak uang saat melakukan aktivitas sehari-hari, dan tidak semua perusakan uang terjadi karena niat untuk merusak. Pembuktian niat jahat atau "*mens rea*" dalam kasus ini menjadi sangat rumit dan seringkali tidak dapat dibuktikan secara kuat di pengadilan. Selain itu, dalam teori pemidanaan harus memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian untuk dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut mempunyai niat dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Dua unsur ini, sangat penting tetapi dalam tindak pidana pengrusakan uang kertas sulit untuk dibuktikan.

Di sisi lain, peran sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang aturan ini masih sangat terbatas. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui bahwa

perusakan uang merupakan pelanggaran, apalagi pelanggaran yang bisa berujung pada ancaman hukum. Minimnya sosialisasi dari pemerintah dan Bank Indonesia mengenai aturan ini juga turut berkontribusi pada tingginya angka perusakan uang. Ketidaktahuan masyarakat menjadikan penegakan hukum menjadi semakin sulit karena persepsi umum yang berkembang adalah bahwa uang kertas hanyalah objek fisik yang dapat diperlakukan sekehendak hati.

Penegakan hukum yang kurang prioritas pada kasus perusakan uang turut memperburuk keadaan. Seringkali, aparat penegak hukum lebih mengutamakan kasus-kasus yang dianggap lebih serius atau berisiko tinggi bagi masyarakat, seperti kasus kriminalitas atau korupsi, dibandingkan kasus perusakan uang yang dampaknya mungkin tidak langsung dirasakan. Karena berbagai hambatan ini, meskipun ada aturan yang melarang perilaku perusakan uang, proses pidana terhadap pelaku seringkali tidak berjalan efektif dan malah menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap uang sebagai alat tukar resmi negara.

C. Penutup

Dalam perannya sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai, uang memiliki pentingnya yang besar bagi ekonomi modern. Oleh karena itu, mata uang tidak boleh dipalsukan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Di era sekarang, kejahatan terkait mata uang, terutama yang melibatkan pengrusakan uang kertas, sering terjadi. Salah satu jenis kejahatan yang umum adalah pengrusakan uang kertas. Pada Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 yang menjelaskan mengenai Mata Uang mengatur bahwa seseorang yang secara sengaja merusak, mengubah bentuk, atau mengubah ukuran fisik uang kertas dapat dikenakan sanksi.

Pelaku pengrusakan atau *vandalisme* terhadap uang kertas dapat diberikan sanksi pidana, seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 UU Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku yang merusak uang kertas rupiah, sebagai lambang negara, dapat dijatuhi

hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penelitian mengenai kebijakan larangan pengrusakan uang kertas menunjukkan bahwa individu yang sengaja mencoret atau merusak uang kertas dapat dikenakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa setiap tindakan kejahatan terkait uang, terutama pengrusakan uang kertas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Agar masyarakat tidak membudayakan untuk merusak uang kertas, dan menyimpan sebagaimana mestinya. Supaya masyarakat dapat ikut menjaga mata uang sebagai representasi dari otoritas negara. Bagi tiap-tiap Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU No 7 Tahun 2011, individu yang secara sengaja melakukan perilaku tindak pidana mengrusak uang kertas dapat dikenai sanksi dengan jerat maksimal agar menimbulkan efek jera.

Daftar pustaka

Jaya Irvan Muh, (2022). Analisis Hukum Penghentian Penyidikan Atas Tindak Pidana Merusak Mata Uang (Studi Kasus Nelayan Kondingareng), Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.

Kurniawan Arief, (2018). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan.

Lisi Zairani Ivan, (2007). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.

Roeslan Saleh, (1986). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 33.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Sekilas Sejarah Hari Oeang Republik Indonesia, melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-madiun/baca-artikel/16545/Sekilas-Sejarah-Hari-Oeang-Republik-Indonesia.html>, diakses Minggu, 13 Oktober 2024

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Sejarah Oeang Republik Indoensia (ORI), melalui <https://visual.kemenkeu.go.id/sejarah-oeang>, diakses Minggu, 13 Oktober 2024

Rhama Ikra, 2023. Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana, melalui <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id>, dikases Senin, 14 Oktober 2024

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana